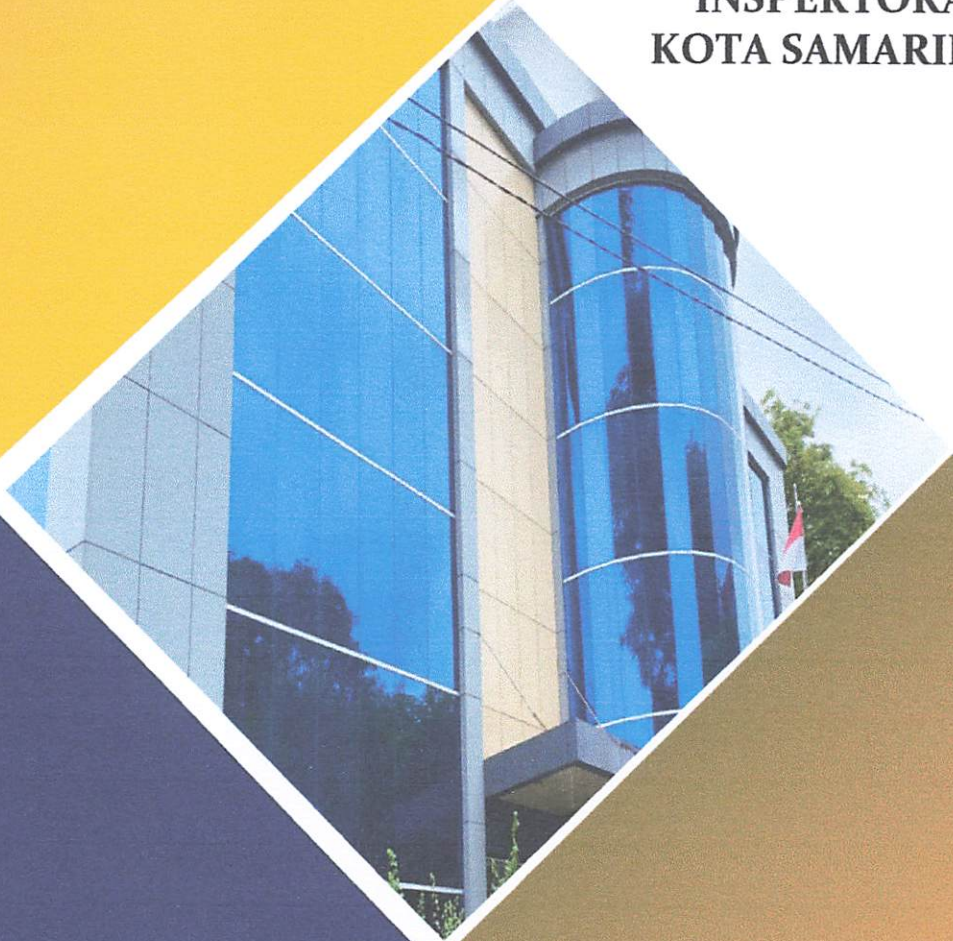




**INSPEKTORAT
KOTA SAMARINDA**



LAPORAN HASIL REVIU

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

IRBAN : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
Nomor : 700.1.2.1/324/200
Tanggal : 25 MARET 2025

Inspektorat Kota Samarinda
Jl. Dahlia No.9 RT.04 Telp/Fax : (0541) 741003
email : inspektoratkotasmd@gmail.com



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Dahlia No. 09 RT. 04 Kel. Bugis ☎(0541) 741003 Fax. 741270
SAMARINDA

Penyelenggaraan Pengawasan Profesional Menuju Pemerintahan Yang Baik

LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Kepada : Wali Kota Samarinda
Dari : Plt. Inspektur Kota Samarinda
Tanggal : 25 Maret 2025
Nomor : 700.1.2.1/324/200
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2024

Berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kota Samarinda Nomor 800.1.11.1/119/200 tanggal 31 Januari 2025 dan Nomor 800.1.11.1/251/200 tanggal 4 Maret 2025 dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

A. Dasar Penugasan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024;

6. Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Samarinda Nomor 800.1.11.1/119/200 tanggal 31 Januari 2025 untuk melakukan reuiu LPPD Kota Samarinda tahun 2024;
7. Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Samarinda Nomor 800.1.11.1/251/200 tanggal 4 Maret 2025 untuk melakukan Perpanjangan reuiu LPPD Kota Samarinda tahun 2024.

B. Ruang Lingkup Reuiu

1) Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

a. Capaian kinerja makro terdiri atas:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Angka Kemiskinan
- Angka Pengangguran
- Pertumbuhan Ekonomi
- Pendapatan Perkapita
- Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)

b. Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

Diukur dari indikator Kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang digunakan untuk mengukur secara obyektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah

c. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Progran dan Kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

- a. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat
- b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi dari Pemerintah Daerah Provinsi.

3) Capaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi:

- a. Capaian penerapan standar pelayanan minimal

- b. Kendala penerapan standar pelayanan minimal
- c. Ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

II. Hasil Reviu

Pengujian terhadap rancangan LPPD tahun 2024 dilakukan atas dokumen yang tersajikan baik yang disampaikan kepada Tim Reviu maupun dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD) per 24 Maret 2025

A. Pencermatan Kesesuaian Materi dan Sistematika Rancangan LPPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah menguraikan mengenai:

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang pembentukan daerah;
- b. Data Geografis Wilayah;
- c. Jumlah Penduduk;
- d. (Belum menginformasikan jumlah Kecamatan Dan Kelurahan)
- e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah
- f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah
- g. Realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah.
- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan strategis pemerintah daerah;

- b. Visi Dan Misi Kepala Daerah;
- c. Program pembangunan daerah, berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, dan
- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan (RKPD 2023).

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran yang telah dijelaskan dari laporan LPPD Tahun 2024 dan telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2024.

BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Telah menguraikan mengenai:

2.1 Capaian Kinerja Makro

Dalam Penjelasan Kinerja Makro telah dijelaskan dan sesuai dengan pedoman LPPD yang berisikan :

- a. Indeks Pembangunan Manusia
- b. Angka Kemiskinan
- c. Angka Pengangguran
- d. Pertumbuhan Ekonomi
- e. Pendapatan Per kapita
- f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dalam Penjelasan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah dijelaskan dan sesuai dengan pedoman LPPD yang berisikan :

- a. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)
- b. Indikator Kinerja Kunci Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam Penjelasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dijelaskan dan sesuai dengan pedoman LPPD Tahun 2024 yang berisikan :

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dalam Pedoman LPPD 2024 telah menguraikan:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
 - 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kota
 - 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kota
 - 3.3 Permasalahan dan Kendala
 - 3.4 Saran dan Tindak Lanjut

BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Penyajian data telah menguraikan:

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran

- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

4.2 Urusan Kesehatan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

4.5 Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

4.6 Urusan Sosial

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

4.7 Program dan Kegiatan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah
- Realisasi
- Alokasi Anggaran
- Dukungan Personil
- Permasalahan dan Solusi

BAB V. PENUTUP

Untuk penutup telah tersajikan dalam rancangan LPPD tahun 2024

B. Pencermatan Data Dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

1. Capaian Kinerja IKK Makro
2. Capaian Kinerja IKK Hasil Per bidang Urusan Pemerintahan

IKK hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024

3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024

III. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

1. Materi dan Sistematika Rancangan LPPD

Berdasarkan hasil reviu kesesuaian materi dan sistematika LPPD Kota Samarinda tahun 2024 **belum** sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2024 dan **belum** sepenuhnya menggambarkan secara rinci bagian-bagian yang menjadi pendukung dalam penyusunan LPPD Tahun 2024, hal tersebut dapat dilihat pada *Lampiran 1*

2. Capaian IKK hasil (*outcome*)

a. Indikator Makro

Dari hasil reviu diketahui terdapat 6 (enam) Capaian Kinerja Makro yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio). Capaian Kinerja Makro memiliki 6 IKK Outcome. Setelah dilakukan reviu diketahui 6 IKK hasil (*Outcome*) atau 100% **telah** didukung dengan data yang memadai, hal tersebut dapat dilihat pada *Lampiran 2*

b. Capaian Kinerja IKK Hasil Per bidang Urusan Pemerintahan

• Urusan Wajib

Urusan wajib, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar, terdiri dari 24 Urusan Pemerintahan, 87 IKK hasil (*outcome*). Setelah dilakukan reviu diketahui 54 IKK hasil (*outcome*) atau 62,07% **telah** didukung dengan data yang memadai, 12 IKK atau 13,79% **belum tepat/belum didukung** dokumen yang memadai dan 21 IKK atau 24,14% **belum ada** dokumen pendukung.

• Urusan Pilihan

Pemerintah Kota Samarinda menyelenggarakan 5 (lima) urusan Pilihan yaitu Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian, memiliki 20 IKK hasil (*outcome*). Setelah dilakukan reviu diketahui 16 IKK hasil (*outcome*) atau 80% **telah** didukung dengan data yang memadai, 1 IKK atau 5% **belum tepat/belum didukung** dokumen yang memadai dan 3 IKK atau 15% **belum ada** dokumen pendukung.

- Fungsi Penunjang Pemerintahan

Dari hasil revidi diketahui terdapat 5 (lima) Fungsi Penunjang Pemerintahan yaitu Perencanaan dan Keuangan, Pengadaan, Kepegawaian, Manajemen Keuangan, dan Transparansi dan Partisipasi Publik. Penunjang Pemerintahan memiliki 19 IKK hasil (*outcome*). Setelah dilakukan revidi diketahui terdapat 13 IKK hasil (*outcome*) atau 68,42% **telah** didukung data yang memadai, 1 IKK atau 5,26% **belum tepat/belum didukung** dokumen yang memadai dan 5 IKK atau 26,32% **belum ada** dokumen pendukung.

c. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (*Lampiran 4*)

Berdasarkan revidi kami, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Capaian Kinerja ini. Namun dari 24 Indikator Sasaran Strategis Pemerintah Kota Samarinda masih terdapat 10 (sepuluh) Indikator Sasaran Strategis yang Dokumentasi belum Andal, 6 (enam) Indikator Sasaran Strategis yang terget Kinerjanya lebih rendah daripada Capaian Kinerja tahun 2023 dan Terdapat 11 (sebelas) Indikator Sasaran Strategis yang Sasaran/indikator sasaran/satuan indikator pada capaian kinerja yang belum selaras dengan Dokumen Perencanaan.

B. Rekomendasi

Atas simpulan diatas direkomendasikan kepada Wali Kota Samarinda agar menginstruksikan kepada Kepala OPD dan Tim penyusun LPPD Kota Samarinda tahun 2024 untuk:

1. Melakukan perbaikan atas Sistematika dan materi pada rancangan akhir LPPD tahun 2024 Pemerintah Kota Samarinda sebelum tanggal 31 Maret 2025 sesuai hasil pengujian pada link. https://drive.google.com/file/d/1WtyVeVBmK9MQ7WvohilFWL0zWPQbE72s/view?usp=drive_link
2. Melengkapi seluruh data dukung sebelum tanggal 31 Maret 2025, terhadap capaian kinerja IKK hasil (*outcome*) yang belum memadai dan yang belum tersajikan sebagai berikut:
 - a. Urusan Wajib
 - 1) 12 IKK Hasil (*Outcome*) belum didukung dokumen yang memadai.

- 2) 21 IKK Hasil (*Outcome*) belum ada dokumen pendukung.
 - b. Urusan Pilihan
 - 1) 1 IKK Hasil (*Outcome*) belum tepat/belum didukung dokumen yang memadai
 - 2) 3 IKK Hasil (*Outcome*) belum ada dokumen pendukung.
 - c. Fungsi Penunjang
 - 1) 1 IKK Hasil (*Outcome*) belum tepat/belum didukung dokumen yang memadai
 - 2) 5 IKK Hasil (*Outcome*) belum ada dokumen pendukung.
 3. Melampirkan dan melengkapi data-data dukung sebelum tanggal 31 Maret 2025, terhadap 10 (sepuluh) Indikator Sasaran Strategis Capaian Akuntabilitas Kinerja yang dokumennya belum Andal.
 4. Kedepannya dalam menetapkan target kinerja pada Perjanjian Kinerja agar ditetapkan dengan perhitungan yang tepat dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya
 5. Kedepannya dalam menyusun materi Perjanjian Kinerja agar memperhatikan keselarasan dengan IKU dan RPJMD
- IV. Penutup
- Demikian laporan hasil revidi ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

Plt. Inspektur,



Marnabas, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV.c)

Nip. 19680628 198803 1 003

PENGUJIAN KESESUAIAN ATAS SISTEMATIKA DENGAN MATERI LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Samarinda		Kesesuaian Sistematika	Kesesuaian Materi	Catatan
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN			
BAB I Pendahuluan				
1.1 Latar Belakang		Sesuai	Sesuai	Terdapat salah ketik tahun anggaran pada paragraf 1
1.1.1 Penjelasan Umum	a. Undang-undang pembentukan daerah	Sesuai	Sesuai	
	b. Data geografis wilayah	Sesuai	Sesuai	
	c. Informasi umum data kependudukan	Sesuai	Sesuai	
		Tidak Sesuai		Belum menginformasikan jumlah kecamatan dan kelurahan
	Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja	Sesuai	Sesuai	langsung masuk poin e, poin d tidak ada
	e. Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah			
	Rincian ASN berdasarkan urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung urusan pemerintahan yang berada di setiap perangkat daerah			Tabel belum terisi, penjelasan juga belum ada
	g. Realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah	Sesuai	Sesuai	
	h. Pelaksanaan program yang memuat alokasi anggaran dan realisasi belanja			
1.1.1 Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Permasalahan strategis	Sesuai	Sesuai	Masih terdapat beberapa masalah pokok yang menyajikan permasalahan dari beberapa tahun sebelumnya (dinilai tidak relevan)
	b. Visi dan misi kepala daerah	Sesuai	Sesuai	
	c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah,	Sesuai	Sesuai	
	d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	Sesuai	Sesuai	Penjelasan masih mengacu pada RKPD Tahun 2023
1.1.1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal	Sesuai	Tidak Sesuai	Belum menggambarkan SPM telah tertuang pada RPJMD dan KUA

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Samarinda		Kesesuaian Sistematis	Kesesuaian Materi	Catatan
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN			
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				
2.1 Capaian Kinerja Makro	Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, meliputi 1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Angka Kemiskinan 3. Angka Pengangguran 4. Pertumbuhan Ekonomi 5. Pendapatan Per kapita 6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Sesuai	Sesuai	
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. 1. Indikator Kinerja Kunci Hasil 2. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	1. Masih terdapat penjelasan mengenai IKK output. 2. Terdapat salah ketik tahun pada penjelasan indikator kinerja kunci
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat: a. target kinerja dalam perjanjian kinerja; b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja; c. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan d. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.	Sesuai	Tidak Sesuai	Penyajian capaian akuntabilitas kinerja belum sesuai dengan capaian kinerja yang telah direviu secara terpisah dan telah ditindaklanjuti.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Samarinda		Kesesuaian Sistematis	Kesesuaian Materi	Catatan
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN			
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN				
Capaian Kinerja pelaksanaan tugas pembantu meliputi :	3.1.Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantu 3.2.Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan 3.3.Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kab/Kota, berisi target, realisasi dan matriks capaian kinerja. 3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kab/Kota, berisi target kinerja, realisasi dan matriks capaian kinerja 3.3.3 Permasalahan dan kendala 3.3.4 Saran dan Tindak Lanjut	Sesuai	Sesuai	
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL				
4.1 Urusan Pendidikan	Laporan Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat: 4.1.1.Jenis Pelayanan Dasar 4.1.2.Target Pencapaian SPM 4.1.3.Realisasi 4.1.4.Alokasi Anggaran 4.1.5.Dukungan Personil 4.1.6.Permasalahan dan Solusi	Sesuai	Sesuai	Masih tercantum narasi penulisan tahun 2023
4.2 Urusan Kesehatan	Laporan Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat : 1.Jenis Pelayanan Dasar 2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 3.Realisasi 4.Alokasi Anggaran 5.Dukungan Personil 6.Permasalahan dan Solusi	Sesuai	Sesuai	Masih tercantum narasi penulisan tahun 2023
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	Laporan Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat : 1.Jenis Pelayanan Dasar 2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 3.Realisasi 4.Alokasi Anggaran 5.Dukungan Personil 6.Permasalahan dan Solusi	Sesuai	Sesuai	Masih tercantum narasi penulisan tahun 2023

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Samarinda		Kesesuaian Sistematis	Kesesuaian Materi	Catatan
SISTEMATIKA	MATERI/URAIAN			
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	Laporan Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat : 1.Jenis Pelayanan Dasar 2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 3.Realisasi 4.Alokasi Anggaran 5.Dukungan Personil 6.Permasalahan dan Solusi	Sesuai	Sesuai	Masih tercantum narasi penulisan tahun 2023
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat : 1.Jenis Pelayanan Dasar 2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 3.Realisasi 4.Alokasi Anggaran 5.Dukungan Personil 6.Permasalahan dan Solusi	Sesuai	Sesuai	Masih tercantum narasi penulisan tahun 2023
4.6 Urusan Sosial	Laporan Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat : 1.Jenis Pelayanan Dasar 2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 3.Realisasi 4.Alokasi Anggaran 5.Dukungan Personil 6.Permasalahan dan Solusi	Sesuai	Sesuai	Masih tercantum narasi penulisan tahun 2023
4.7 Program dan Kegiatan				
BAB V PENUTUP				

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Masih tercantum narasi penulisan tahun 2023
2. Penomoran tabel masih belum urut.
3. Penomoran gambar masih belum urut.
4. Penomoran subbab masih belum sesuai pada Bab I
5. Belum semua hasil tabel menyajikan sumber data

Data dapat dilihat pada link

https://drive.google.com/file/d/1WtyVeVBmK9MQ7WvohilFWL0zWPQbE72s/view?usp=drive_link

IKK MAKRO

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	LAJU KINERJA 2024	SATUAN	PEMDA	APIP	
							BUKTI FISIK	STATUS	KETERANGAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	82.61	83.11	0.605	%	Ada	OK	
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	4.81	4.3	-10.603	%	Ada	OK	
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	5.92	5.75	-2.872	%	Ada	OK	
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	8.62	8.66	0.464	%	Ada	OK	
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	103598711.2	113,316,043.00	9.38	%	Ada	OK	
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0.323	0.33	2.167	%	Ada	OK	

IKK OUTCOME

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau	116.3565	Ada	OK	
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 94227. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 95666	98.49581	Ada	OK	
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 47746. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 49893	95.69679	Ada	OK	
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 3282. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 8343	39.33837	Ada	OK	
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 2010. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 881225	2.280916	Ada	OK	
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 15. Jumlah RS di kabupaten/kota = 15	100	Ada	TIDAK OK	Lampirkan SK walikota terkait penetapan RS Rujukan (sesuai pedoman)
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 12204. Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota = 14121	86.42447	Ada	OK	
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 12656. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 13480	93.88724	Ada	OK	
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 11781. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 12838	91.76663	Ada	OK	
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 49854. Jumlah balita di kabupaten/kota = 56248	88.63248	Ada	OK	
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 110137. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 145559	75.66485	Tidak Ada		
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 438037. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 588826	74.39159	Tidak Ada		
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	0	Tidak Ada		
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 214129. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 216281	99.005	Ada	OK	
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 24118. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 24618	97.96897	Ada	OK	
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGI yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 1090. Jumlah penderita ODGI di kabupaten/kota = 1357	80.32424	Ada	OK	
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 18512. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 23227	79.70035	Ada	OK	
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 28201. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 28235	99.87958	Ada	OK	
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 251.2. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 511.2	49.13928	Ada	OK	

1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota &
-------	---	-----------------------------------	---

1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trinitium yang dapat diselesaikan 	Jumlah pengaduan yang ditangani = 169. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 169	100	Ada	OK	
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 13. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 13	100	Ada	OK	
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	0	Tidak Ada		
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana . Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	0	Tidak Ada		
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	0	Tidak Ada		
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 	Jumlah layanan pemadamam, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Dacrah ditambah jumlah layanan pemadamam di kabupaten/kota dalam tingk. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	0	Tidak Ada		
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	0	Tidak Ada		
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 600. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 708	84.74576	Ada	TIDAK OK	data pendukung penyebut melampirkan data by name by address
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 256. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 256	100	Ada	OK	
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 9. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 15	60	Ada	TIDAK OK	Belum melampirkan Laporan pelaksanaan kegiatan
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 18957. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 78275	24.21846	Ada	TIDAK OK	Belum melampirkan rincian tenaga kerja (lampiran untuk data penyebut)
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 58247.25. Jumlah tenaga kerja = 78275	74.41361	Ada	OK	
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 1142. Jumlah Perusahaan = 2224	51.34892	Ada	OK	
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota 	Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan = 327. Jumlah pencari yang terdaftar = 2030	16.10837	Ada	OK	

[illegible]

2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 186060. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 254618	73.07417	Ada	OK	
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 265753. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 280515	94.73754	Ada	TIDAK OK	Lampirkan data dukung terinci sesuai dengan yang diminta pedoman
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 17. Jumlah PD = 15	113.3333	Ada	OK	
2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 1	0	Ada	OK	
2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 1	0	Ada	OK	
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.01	Ada	TIDAK OK	Idealnya data dapat disajikan setiap tahunnya tanpa menunggu data dari BPS/BKKN karena data yang dibutuhkan hanya jumlah perempuan pada kelompok umur dan jumlah kelahiran dalam kelompok umur pada tahun 2024
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 83574. Jumlah Pasangan Usia Subur = 119134	70.15126	Ada	OK	
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 10444. Jumlah Pasangan Usia Subur = 119134	8.766599	Ada	TIDAK OK	Sesuaikan format data dukung dengan Pedoman
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		57	Ada	OK	
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0.48	Ada	OK	
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 40. Jumlah PD = 40	100	Ada	OK	
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 21. Jumlah Layanan Publik = 51	41.17647	Ada	OK	
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 695561. Jumlah penduduk = 619842	112.2159	Ada	OK	
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset. Jumlah seluruh koperasi aktif	0	Tidak Ada		
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirasusaha. Jumlah usaha mikro keseluruhan	0	Tidak Ada		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PENGUJIAN TERHADAP KESELARASAN CAPAIAN AKIN TERHADAPA DOK PERENCANAAN										
No	Laporan Capaian Kinerja			Keselarasan dengan Perjanjian Kinerja		Keselarasan dengan RPJMD		Keselarasan dengan IKU		Kesimpulan
	Sasaran	Indikator	Target	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	74,95 angka	✓		✓			✓	Terdapat perbedaan satuan pada IKU
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	15,51 angka	✓		✓			✓	Terdapat perbedaan satuan pada IKU
		Rata-rata lama sekolah	10,81 angka	✓		✓			✓	Terdapat perbedaan satuan pada IKU
3	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	52 Indeks	✓		✓			✓	-Satuan pada Capaian Kinerja 'Indeks' sedangkan pada IKU 'Poin'
4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG	89,45 Indeks	✓		✓			✓	(2) Satuan pada Capaian Kinerja 'Indeks' sedangkan pada IKU 'Poin'
5	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55 Indeks	✓		✓			✓	Terdapat perbedaan satuan pada IKU
8	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	Rp23.50T	✓			✓		✓	(1) Sasaran pada Capaian Kinerja 'Meningkatnya jumlah dan nilai investasi' sedangkan pada RPJMD 'Meningkatnya nilai investasi' (2) Indikator pada Capaian Kinerja 'Jumlah Nilai Investasi' sedangkan pada RPJMD & IKU 'Nilai Investasi'
15	Meningkatkan eksebitas inter dan antar wilayah kota	Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	73.29 Persentase	✓		✓			✓	- Satuan pada Laporan Capaian Kinerja "Persentase" sedangkan Satuan pada IKU "Persen".
16	Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup	59.28Indeks	✓		✓			✓	- Satuan pada Laporan Capaian Kinerja, PK "Indeks", sedangkan pada IKU tidak terdapat Satuan
		Persentase pemukiman yang tertata	21.75Persentase	✓		✓			✓	- Satuan pada Laporan Capaian Kinerja, PK "Persentase", sedangkan satuan pada IKU "Persen"
17	Mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim	Persentase kawasan banjir yang tertangani	43.23Persentase	✓		✓			✓	- Satuan pada Laporan Capaian Kinerja, PK "Persentase", sedangkan satuan pada IKU "persen"

*Isi nomor sesuai nomor sasaran

KESIMPULAN:1. Terdapat 11 (sebelas) Indikator Sasaran Strategis yang Sasaran/indikator sasaran/satuan indikator pada capaian kinerja yang *belum selaras* dengan Dokumen Perencanaan

PENGUJIAN AKIP ATAS KESESUAI MATERI PENYAJIAN DAN KEANDALAN					
No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Catatan Hasil Reviu (CHR)
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Angka	10,81	Target tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023. Namun target tidak dapat diubah, menyesuaikan dengan target pada PK
3	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	52	(2) Keabsahan bukti dukung Laporan Akhir IPP Kota Samarinda 2024 pada link drive belum terpenuhi (3) Capaian 2024 berbeda-beda nilainya antar bukti dukung: -63 dari IPP Kota Samarinda 2024 -66,04 dari Laporan Akhir IPP Kota Samarinda 2024 Hal. 88 & 89 -66,4 dari rekalkulasi Laporan Akhir IPP Kota Samarinda 2024 Hal. 88 & 89 yaitu $(90+60+55+60+67)/7 = 66,4$ (4) Target tahun 2024 52 lebih rendah dari capaian 2023 61,17 (5) Bukti dukung capaian 2022 belum tertera
4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG	Indeks	89,45	(2) Keabsahan bukti dukung IPG Kota Samarinda pada link drive belum terpenuhi (3) Capaian masih menggunakan angka tahun 2023 (4) Hal. 20 Persentase Capaian Kinerja Tahun 2024 perhitungannya belum sesuai (seharusnya 100,69%) (5) Bukti dukung capaian tahun sebelumnya belum tertera
5	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55	Penjabaran capaian pada hal. 24 tidak sesuai dengan tabel pada hal. 23;
6	Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persentase	6,2	(1) Keabsahan narasi analisis Capaian Indikator pada link drive belum terpenuhi (3) Capaian masih menggunakan angka TW 3 2024 (5) Target tahun 2024 6,2 lebih rendah dari capaian 2023 8,43 (8) Hal.30 pada baris target dan realisasi belum sinkron dengan target dan realisasi pada tabel capaian kinerja 2024 hal. 27
7	Meningkatnya Kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan kewirausahaan baru	Unit Usaha	2.000	(1) Keabsahan narasi analisis Capaian Indikator pada link drive belum terpenuhi (2) Keabsahan bukti dukung pada drive belum terpenuhi
8	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah nilai investasi	Rupiah	23,50 T	(1) Keabsahan narasi analisis Capaian Indikator pada link drive belum terpenuhi
13	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks SPBE	Indeks	2,7	1. Keabsahan bukti dukung pada link drive belum terpenuhi 2. Target tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023 3. Hal. 66 Standar Nasional 2.79 belum memiliki bukti dukung 4. Belum ada dijelaskan analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja
14	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	63,44	3. Target tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023

15	Meningkatkan aksesibilitas inter dan antas wilayah kota	Rasio aksesibilitas antar wilayah kota	Nilai	1.001	2. Target Th.2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023; 4. Faktor Keberhasilan dalam pencapaian kinerja belum dijelaskan.
16	Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas	Persentase tersedianya luasan RTH	Persentase	1,53	1. Keabsahan bukti dukung pada drive belum terpenuhi
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,28	1. Keabsahan bukti dukung belum terpenuhi hanya berupa draft
17	Meningkatnya kapasitas kota Tangguh	Indeks Resiko Bencana	Poin	85,05	1. Keabsahan bukti dukung pada drive belum terpenuhi 4. Belum mencantumkan Data dukung capaian nasional
KESIMPULAN: 1. Terdapat 10 (Sepuluh) Indikator Sasaran Strategis yang dokumen pendukungnya <i>belum andal</i> ; 2. Terdapat 6 (enam) Indikator Sasaran Strategis yang penetapan target tahun 2024 <i>lebih kecil</i> dari capaian tahun 2023.					